

## LAMPIRAN

Lampiran 1. Data Koperasi Kecamatan Tejakula

N O	nmkop	kelurahan	Nobh	tglbh	Aktif	Tdk Aktif
	<b>TEJAKU LA</b>					
1	KUD. Dharma Prawerti	Desa Tejakula	92/BH/PAD/KWK 22/III/1996	3/25/ 1996	1	-
2	KSU. Anyar Sari	Desa Sembiran	09/BH/Disperindagko p/VII/2005	04/07 /2005	1	-
3	KSU. Bina Pertiwi	Desa Madenan	13/BH/Disperindagko p/VIII/2005	10/08 /2005	1	-
4	KSU. Laksmi Prasanthi	Desa Tembok	41/BH/Disperindagko p/VIII/2006	28/08 /2006	1	-
5	KSU. Tani Mekar	Desa Tembok	53/BH/Disperindagko p/XII/2006	18/12 /2006	-	1
6	KSU. Sata Winangun	Desa Sambirenteng	47/BH/XXVII. 3/IV/2009	20/04 /2009	-	1
7	KSU. Sedana Murti	Desa Bondalem	59/BH/XXVII. 3/XI/2009	30/11 /2009	-	1
8	KSU. Partha Wijaya	Desa Tejakula	71/BH/XXVII. 3/V/2010	20/05 /2010	1	-
9	KSP. Artha Winangun	Desa Penuktukan	10/BH/Diskop/VII/20 02	10/07 /2002	1	-
10	KSP. Cipta Mulia	Desa Bondalem	10/BH/Diskop/IX/200 3	26/09 /2003	1	-
11	KPSP Dwi Tunggal Tirta Sari	Desa Tejakula	11/BH/Disperindagko p/VII/2005	14/07 /2005	-	1
12	KSP. Karya Bersama Sejahtera	Desa Tembok	24/BH/XXVII.3/VIII/ 2015	31/08 /2015	1	-
13	KSP. Usaha Beraya Bopeas	Desa Bondalem	16/BH/XXVII.3/IV/2 016	08/04 /2016	1	-
14	KSP.	Desa Les	20/BH/XXVII.3/IV/2	11/04		

	Karang Artha Sedana		016	/2016	-	1
15	KSP.Gemah Ripah Loh Jinawi Bondalem	Desa Bondalem	004430/BH/M.KUK M/VI/2017	14/06 /2017	-	1
16	KSP.Sapta Sedana Murti	Desa Bondalem	004489/BH/M.KUK M/VI/2017	19/06 /2017	1	-
17	KPN. Praja Kerta Buana	Desa Tejakula	186/BH/PAD/KWK 22/III/1996	26/03 /1996	1	-
18	KPN. Widya Karma	Desa Tejakula	79/BH/PAD/KWK 22/III/1996	25/03 /1996	1	-
19	Koptan. Tirta Amerta	Desa Pacung	55/BH/Disperindagkop/XII/2006	18/12 /2006	1	-
20	Kopas. Boga Prajahita	Desa Bondalem	04/BH/XXVII.3/IV/2013	11/04 /2013	1	-
21	Kop. Garam Tasik Segara Lestari	Desa Les	002200/BH/M.KUK M.2/IX/2016	23/09 /2016	-	1
22	Kop. Produsen Bukit Sedana Nadi	Desa Sembiran	009714/BH/M.KUK M.2/IX/2018	26/09 /2018	1	-
23	Kopjaspar Bali Sipapan Sejahtera	Desa Sembiran	004473/BH/M.KUK M.2/VI/2017	16/06 /2017	1	-
24	Kop. Kons. Sri Waringin janggotan	Desa Sembiran	005140/BH/M.KUK M.2/IX/2017	05/09 /2017	-	1
25	Koperasi Konsumen Sentana Sukaji Rami	Desa Les	014073/BH/M.KUK M.2/VII/2019	18/07 /2019	1	-
26	Kop. Pemasaran	Desa pacung	005462/BH/M.KUK M.2/X/2017	02/10 /2017	1	-

	Sekar Wangi Sejahtera					
27	Koperasi Pemasaran Krama Bali Sejahtera Bali Mula	Desa Les	AHU-0000248.AH.01.26.T AHUN 2019	13/11/2019	1	-
28	Koperasi Pemasaran Pasar Tat Twam Asi	Desa Penuktukan	012894/BH/M.KUK M.2/III/2019	27/03/2019	1	-
	<b>JUMLAH</b>				<b>20</b>	<b>8</b>



## Lampiran 2. SOP KSP Usaha Beraya Bopeas

**SOP KSP USAHA BERAYA BOPEAS****BAB III****PINJAMAN**

## Pasal 13

## Wewenang pemberian pinjaman

- a. Pinjaman Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) ke bawah wewenang pemberian pinjaman di berikan kepada manajer/Pengelola.
- b. Pinjaman Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sampai 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) wewenang pinjaman di berikan kepada manajer dengan melaporkan ke pengurus.
- c. Pinjaman diatas Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) wewenang pemberian pinjaman di berikan kepada manajer dengan persetujuan pengurus.
- d. Pinjaman diatas Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) di usulkan oleh manager/pengelola kepada team pinjaman serta pengurus untuk mendapat persetujuan.
- e. Dalam pemberian pinjaman akan di bentuk team pinjaman dengan SK Pengurus
- f. Tugas team pinjaman akan di buat dalam aturan tersendiri

## Lampiran 3. Daftar pertanyaan wawancara

**Daftar Pertanyaan Wawancara**

1. Sejak kapan berdirinya KSP Usaha Beraya Bopeas?
2. Bagaimana struktur organisasi dari KSP Usaha Beraya Bopeas?
3. Apakah terdapat pemisahan fungsi dan pembagian tugas pada struktur KSP Usaha Beraya Bopeas?
4. Bagaimana peranan dan tanggungjawab dari struktur organisasi di KSP Usaha Beraya Bopeas tersebut?
5. Bagaimana kebijakan perusahaan dalam pemberian wewenang dan tanggung jawab terhadap karyawan?
6. Apakah terdapat kriteria dan persyaratan kompetensi minimal untuk setiap jabatan dari KSP Usaha Beraya Bopeas?
7. Apakah setiap karyawan memiliki pengetahuan dan keterampilan tentang tugasnya?
8. Apakah KSP Usaha Beraya Bopeas melakukan pelatihan kepada karyawan dalam memahami tugas dan tanggungjawabnya dalam melaksanakan kegiatan?
9. Bagaimana alur kordinasi dari setiap struktur organisasi di KSP Usaha Beraya Bopeas tersebut?
10. Apakah ada permasalahan dan kendala dari alur kordinasi pada di KSP Usaha Beraya Bopeas tersebut dan bagaimana cara anda untuk menanggulangi permasalahan dan kendala dari alur kordinasi di KSP Usaha Beraya Bopeas tersebut?

11. Bagaimana bisa permasalahan dan kendala tersebut dapat terjadi di KSP Usaha Beraya Bopeas sedangkan KSP Usaha Beraya Bopeas ini telah menerapkan sistem pengendalian internal yang sesuai dengan SOP yang ada?
12. Menurut anda bagaimana peranan sistem pengendalian internal dalam menanggulangi permasalahan dan kendala yang terjadi pada alur kordinasi yang berdampak pada KSP Usaha Beraya Bopeas?
13. Apakah KSP Usaha Beraya Bopeas melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pengendalian internal dan bagaimana pelaksanaannya?
14. Apakah KSP Usaha Beraya Bopeas memberikan hukuman yang tegas bagi karyawan yang melakukan kecurangan untuk kepentingan diri sendiri?
15. Apakah pimpinan berhati-hati dalam membuat kebijakan?
16. Apakah pimpinan menunjukkan integritas dan nilai etika?
17. Apakah pemimpin dan pengawas melakukan pemantauan terhadap kegiatan operasional KSP Usaha Beraya Bopeas?  
Jawaban: Pemantauan ini juga perlu dilakukan oleh pemimpin dan pengawas tapi ini dilakukan diwaktu tertentu saja.
18. Apakah pimpinan sudah memastikan terjalannya komunikasi internal yang efektif?
19. Apakah setiap penyimpangan dilaporkan kepada pimpinan?
20. Apa pedoman yang digunakan oleh KSP Usaha Beraya Bopeas dalam menerapkan sistem pengendalian internal?
21. Apakah KSP Usaha Beraya Bopeas memiliki prosedur standar operasional tertulis untuk setiap karyawan?

22. Apakah dalam melakukan pemberian pinjaman atau kredit sudah berdasarkan pada SOP (Standar Operasional Prosedur) pada KSP Usaha Beraya Bopeas ?
23. Apakah pimpinan menggunakan sarana untuk mengkomunikasikan informasi penting kepada karyawan?
24. Apakah karyawan dapat mengkomunikasikan informasi secara langsung kepada pimpinan?
25. Apakah karyawan memiliki hak untuk melaporkan kecurangan yang terjadi? dan bagaimana cara karyawan melaporkan kecurangan tersebut?
26. Apakah pimpinan memantau jalannya keefektifan pengendalian internal perusahaan secara rutin?
27. Bagaimana peranan sanksi adat dadia dalam upaya meminimalisir terjadinya kecurangan di KSP Usaha Beraya Bopeas?
28. Bagaimana mekanisme penerapan penguatan sistem pengendalian internal dalam upaya meminimalisir kecurangan pada koperasi di KSP Usaha Beraya Bopeas?
29. Apakah ada kendala- kendala dalam penguatan sistem pengendalian internal dengan berlakunya sanksi adat dadia dalam upaya mencegah kecurangan di KSP Usaha Beraya Bopeas?
30. Bagaimana keberlanjutan dari penguatan sistem pengendalian internal dengan berlakunya sanksi adat dadia dalam upaya meminimalisir kecurangan di KSP Usaha Beraya Bopeas?

30. Apakah hasil keputusan pada rapat pemberian sanksi adat dapat digunakan sebagai acuan atau dasar dalam pemberian sanksi adat kepada pelaku kecurangan di KSP Usaha Beraya Bopeas?

#### Lampiran 4. Hasil wawancara

1. Sejak kapan berdirinya KSP Usaha Beraya Bopeas?

Jawaban: Koperasi ini didirikan pada tanggal 24 Agustus 2015

2. Bagaimana struktur organisasi dari KSP Usaha Beraya Bopeas?

Jawaban: Untuk struktur dari koperasi ini terdiri dari adanya pengurus, pengawas, kasir, juru buku, juru tagih, dan anggota. Yang dimana semua pengurus ini telah memiliki wewenang dan kewajibannya masing-masing sesuai dengan bidangnya.

3. Apakah terdapat pemisahan fungsi dan pembagian tugas pada struktur KSP Usaha Beraya Bopeas?

Jawaban: Tentu saja, untuk setiap kepengurusan dari koperasi ini telah diatur mengenai wewenang, fungsi dan tanggungjawab yang dimiliki oleh masing-masing kepengurusan koperasi. Hal ini juga telah disesuaikan dalam undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang pengkoperasian mengenai tugas dan wewenang dari masing-masing struktur koperasi.

4. Bagaimana peranan dan tanggungjawab dari struktur organisasi di KSP Usaha Beraya Bopeas tersebut?

Jawaban: Untuk peranan dan tanggungjawab dari struktur organisasi di KSP Usaha Beraya Bopeas ini dapat adik lihat pada lampiran mengenai



pembagian tugas dari masing- masing kepengurusan dari KSP Usaha Beraya Bopeas.

5. Bagaimana kebijakan perusahaan dalam pemberian wewenang dan tanggung jawab terhadap karyawan?

Jawaban: Dalam pemberian kebijakan untuk pemberian wewenang terhadap karyawan koperasi ini telah disesuaikan sebelumnya dengan Standar Operasional Perusahaan (SOP) yang ada.

6. Apakah terdapat kriteria dan persyaratan kompetensi minimal untuk setiap jabatan dari KSP Usaha Beraya Bopeas

Jawaban: Tentu saja terdapat kriteria dan juga persyaratan kompetensi untuk setiap jabatan dari koperasi, hal ini telah disesuaikan pada Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 15/ Per/ M.KUKM/IX/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.

7. Apakah setiap karyawan memiliki pengetahuan dan keterampilan tentang tugasnya?

Jawaban: Iya memiliki karena setiap karyawan yang telah dinyatakan sesuai dengan persyaratan dan citra koperasi ini sudah pasti memiliki sudatu pengetahuan dan keterampilan mengenai tugasnya

8. Apakah KSP Usaha Beraya Bopeas melakukan pelatihan kepada karyawan dalam memahami tugas dan tanggungjawabnya dalam melaksanakan kegiatan?

Jawaban: Pelatihan kepada karyawan ini sudah dilakukan oleh koperasi tidak hanya digunakan untuk memahami tugas dan tanggungjawab nya akan tetapi

untuk menambah pengetahuan dikarenakan adanya perkembangan era digital masa kini

9. Bagaimana alur kordinasi dari setiap struktur organisasi di KSP Usaha Beraya Bopeas tersebut?

Jawaban: Alur kordinasinya memang sudah disesuaikan dengan standar operasional (SOP) akan tetapi terdapat permasalahan

10. Apakah ada permasalahan dan kendala dari alur kordinasi di KSP Usaha Beraya Bopeas tersebut dan bagaimana cara anda untuk menanggulangi permasalahan dan kendala dari alur kordinasi di KSP Usaha Beraya Bopeas tersebut ?

Jawaban: Terdapat permasalahan dari alur kordinasi, dimana seperti yang adik lihat di struktur organisasi terdapat perangkapan jabatan antara manager dan pengurus koperasi sehingga dalam menjalankan wewenang terjadi permasalahan disana dan hal ini menyebabkan terjadinya kecurangan pada koperasi yang memungkinkan koperasi dapat mengalami kebrangkutan. Dan dari adanya kejadian tersebut selanjutnya dilakukannya musyawarah pada rapat anggota untuk mendapatkan cara menanggulangi yaitu dengan diterapkan sanksi adat tersebut. Nah sanksi adat ini telah diputuskan secara bersama- sama saat itu.

11. Bagaimana bisa permasalahan dan kendala terebut dapat terjadi di KSP Usaha Beraya Bopeas sedangkan KSP Usaha Beraya Bopeas ini telah menerapkan sistem pengendalian internal yang sesuai dengan SOP yang ada?

Jawaban: Memang benar adanya koperasi ini telah memiliki sistem pengendalian internal yang baik dan sesuai dengan SOP akan tetapi ternyata

dari faktanya saat ini terjadi permasalahan yang muncul akibat dari struktur organisasi yang dimana adanya perekapan jabatan ini telah membuat tugas dan wewenang yang seharusnya dapat dijalankan sesuai dengan tugasnya masing- masing menjadi tidak dapat dijalankan karena adanya kesalahan akibat dari wewenang pemberian pinjam yang dilakukan, dimana yang seharusnya harus sesuai dengan SOP BAB 3 Pasal 13.

12. Menurut anda bagaimana peranan sistem pengendalian internal dalam menanggulangi permasalahan dan kendala yang terjadi pada alur kordinasi yang berdampak KSP Usaha Beraya Bopeas?

Jawaban: Dalam menanggulangi permasalahan dan kendala yang terjadi pada alur kordinasi di KSP Usaha Beraya Bopeas tersebut dari kami telah melakukan banyak pertimbangan terlebih dahulu dengan upaya menjaga sistem pengendalian internal ini tetap berjalan baik dengan cara mengikuti SOP yang kami tetapkan pada saat itu. Dengan harapan agar SOP ini menjadi tombak dan acuan bagi kami untuk dapat menjalankan tugas, fungsi, dan wewenang sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga nantinya tidak muncul lagi permasalahan yang sama.

13. Apakah KSP Usaha Beraya Bopeas melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pengendalian internal dan bagaimana pelaksanaannya?

Jawaban: Tentu saja evaluasi ini dilakukan dan sangat perlu dilakukan oleh koperasi kami. Evaluasi ini dilakukan guna untuk memastikan apakah dalam menjalankan kegiatan operasional simpan pinjam ini sudah sesuai dengan aturan yang berlaku berdasarkan SOP yang ditetapkan. Dan untuk evaluasi ini kami lakukan selama 1 bulan sekali. Untuk pelaksanaannya hanya berupa

memastikan setiap fungsi, tugas, dan wewenang sudah sesuai berdasar SOP tersebut.

14. Apakah KSP Usaha Beraya Bopeas memberikan hukuman yang tegas bagi karyawan yang melakukan kecurangan untuk kepentingan diri sendiri?

Jawaban: Ketika adanya kecurangan tentu saja pihak dari kami pasti memberikan suatu tindakan yang tegas bagi pengurus kami yang melakukan suatu pelanggaran.

15. Apakah pimpinan berhati-hati dalam membuat kebijakan?

Jawaban: Tentu saja dalam membuat kebijakan ini pemimpin berhati-hati

16. Apakah pimpinan menunjukkan integritas dan nilai etika?

Jawaban: Tentu saja pemimpin seharusnya memiliki integritas dan nilai etika karena pemimpin merupakan suatu contoh bagi karyawan- karyawannya namun yang terjadi adalah pemimpin pada KSP Usaha Beraya Bopeas telah melakukan tindakan kecurangan berupa penyelewengan wewenang.

17. Apakah pemimpin dan pengawas melakukan pemantauan terhadap kegiatan operasional KSP Usaha Beraya Bopeas?

Jawaban: Iya, pemantauan ini juga perlu dilakukan oleh pemimpin dan pengawas untuk mengecek setiap kegiatan operasional yang dilakukan setiap waktu

18. Apakah pimpinan sudah memastikan terjalannya komunikasi internal yang efektif?

Jawaban: Ketika pemimpin dan pengawas melakukan pemantauan tentu saja pasti memastikan setiap hal berjalan dengan baik termasuk juga dengan komunikasi internal karena komunikasi ini yang menghubungkan karyawan

dengan pemimpin yang nantinya akan membangun suatu rasa kekeluargaan, dan keakraban.

19. Apakah setiap penyimpangan dilaporkan kepada pimpinan?

Jawaban: Tentu saja untuk setiap penyimpangan ini perlu dilaporkan ke pemimpin koperasi agar nantinya pemimpin koperasi dapat memastikan dan mencairitahu apakah benar adanya penyimpangan tersebut atau tidak, serta mencari solusi untuk dapat mengatasi permasalahan yang terjadi

20. Apa pedoman yang digunakan oleh KSP Usaha Beraya Bopeas dalam menerapkan sistem pengendalian internal?

Jawaban: Sampai saat ini KSP Usaha Beraya Bopeas hanya menerapkan SOP (Standar Operasional Prosedur) dalam menerapkan sistem pengendalian internal.

21. Apakah KSP Usaha Beraya Bopeas memiliki prosedur standar operasional tertulis untuk setiap karyawan?

Jawaban: Tentu saja setiap koperasi memiliki SOP tak terkecuali dengan KSP Usaha Beraya Bopeas ini

22. Apakah dalam melakukan pemberian pinjaman atau kredit sudah berdasarkan pada SOP (Standar Opersional Prosedur) pada KSP Usaha Beraya Bopeas ?

Jawaban: Belum dijalankannya SOP pada pasal 13 mengenai wewenang pemberian pinjaman yang dimana manajer pada KSP Usaha Beraya Bopeas ini tidak melaporkan pemberian pinjaman atau kredit kepada pengurus koperasi lainnya.

23. Apakah pimpinan menggunakan sarana untuk mengkomunikasikan informasi penting kepada setiap tingkatan kepengurusan koperasi?

Jawaban: Untuk sarana yang digunakan untuk mengkomunikasikan informasi penting kepada setiap kepengurusan ini biasanya pemimpin menggunakan media sosial seperti whatsapp.

24. Apakah setiap tingkatan kepengurusan dapat mengkomunikasikan informasi secara langsung ataupun tidak langsung kepada pemimpin?

Jawaban: Tentu saja setiap tingkatan kepengurusan dapat mengkomunikasikan setiap informasi baik itu memberi pendapat dan bertanya secara langsung dan tidak langsung kepada pemimpin karena hal ini diperlukan untuk membangun rasa kekeluargaan yang dimiliki koperasi serta untuk menjaga koordinasi antara setiap tingkatan kepengurusan koperasi dalam pelaksanaan kegiatan operasional koperasi.

25. Apakah karyawan memiliki hak untuk melaporkan kecurangan yang terjadi ? dan bagaimana cara karyawan melaporkan kecurangan tersebut?

Jawaban: Untuk melaporkan tindakan kecurangan ini karyawan tidak memiliki hak untuk hal tersebut

26. Apakah pimpinan dan pengawas memantau jalannya keefektifan pengendalian internal perusahaan secara rutin?

Jawaban : Tentu saja pemimpin dan pengawas melakukan suatu pemantauan secara rutin karena memastikan apakah setiap kegiatan operasional yang berhubungan dengan pengendalian internal dari dalam koperasi tersebut sudah efektif atau tidak

27. Bagaimana peranan sanksi adat dadia dalam upaya meminimalisir terjadinya kecurangan di KSP Usaha Beraya Bopeas?

Jawaban: Peranan sanksi adat dadia dalam upaya meminimalisir kecurangan ini dilakukan dengan memberikan suatu sanksi – sanksi kepada seseorang yang melakukan suatu pelanggaran sehingga nantinya dengan peraturan ini akan memberikan suatu efek jera yang akan membuat seseorang yang menerima sanksi tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Untuk sanksi-sanksi yang diberikan ini dapat berupa sanksi yang berat dan ringan. Dan untuk sanksi- sanksi tersebut adik dapat lihat pada lampiran ini.

28. Bagaimana mekanisme penerapan penguatan sistem pengendalian internal dalam upaya meminimalisir kecurangan di KSP Usaha Beraya Bopeas?

Jawaban: Untuk mekanisme penerapan penguatan SPI yang dilakukan oleh kami ini dengan melakukan beberapa tahapan yaitu:

1. Menentukan permasalahan yang terjadi pada koperasi
2. Melakukan analisis mengenai penyebab munculnya permasalahan tersebut yang berdampak pada koperasi
3. Melakukan pencarian solusi atau cara mengatasi permasalahan dengan melakukan musyawarah pada rapat anggota bersama kelihan dadia serta seluruh dadia yang ada untuk memutuskan hal apa yang perlu dilakukan karena sebelumnya SOP masih belum mampu meminimalisir kejadian.
4. Membuat kesepakatan mengenai perumusan solusi yaitu dengan diterapkan sanksi adat dadia serta merumuskan sanksi- sanksi apa saja yang akan diterapkan yang bergantung pada tingkat kecurangan yang dilakukan. Berikut ini hasil kesepakatan sanksi adat dadia:

a. Sanksi Ringan

- Pemberian Teguran Lisan atas tindakan yang dilakukan

- Pemberian Teguran Tertulis atas tindakan yang dilakukan
- Membuat surat pernyataan tertulis mengenai tidak melakukan tindakan yang sama kembali.

b. Sanksi Sedang

- Pemotongan gaji atau penurunan gaji yang disesuaikan dengan keputusan adat
- Pemberhentian sementara dari jabatan selama kurun waktu yang ditentukan berdasar keputusan adat

c. Sanksi Berat

- Dikenakan denda berupa pengembalian uang sesuai dengan keputusan adat dengan tengat batas waktu pembayaran yang ditentukan
- Pemberhentian secara tidak hormat yang diputuskan berdasarkan hasil rapat anggota
- Dikenakan sanksi kasepekang berdasarkan dari kesepakatan bersama. Untuk keputusan sanksi ini perlu dilakukan tahapan dalam menentukan keputusannya yaitu:
  - Perlu dilakukan rapat bersama yang nantinya rapat ini diketuai oleh kelihan dadia
  - Hasil dari keputusan rapat diumumkan kepada karma dadia untuk menjadi pertimbangan akan keputusan tersebut.



- Kelihan dadia wajib untuk mempertimbangkan berbagai masukan dari karma dadia akan keputusan yang nanti akan diambil.
- Keputusan akhir akan disampaikan oleh kelihan dadia dihadapan seluruh karma dadia pada saat rapat berlangsung.

5. Mulai menerapkan sanksi adat dadia guna untuk meminimalisir munculnya permasalahan yang terjadi pada KSP Usaha Beraya Bopeas

29. Apakah ada kendala- kendala dalam penguatan sistem pengendalian internal dengan berlakunya sanksi adat dadia dalam upaya mencegah kecurangan di KSP Usaha Beraya Bopeas?

Jawaban: Pada sanksi adat dadia KSP Usaha Beraya Bopeas telah diatur bahwa bagi pihak yang bersangkutan wajib untuk melakukan pengembalian uang yang disalahgunakan dengan tenggat waktu yang telah ditentukan yang berdasarkan pada keputusan adat. Hal ini memunculkan kendala yang dimana terdapat oknum yang tidak setuju mengenai aturan tersebut dan oknum tersebut tidak mengembalikan uang yang telah disalahgunakan yang menyebabkan kredit kurang lancar pada KSP Usaha Beraya Bopeas.

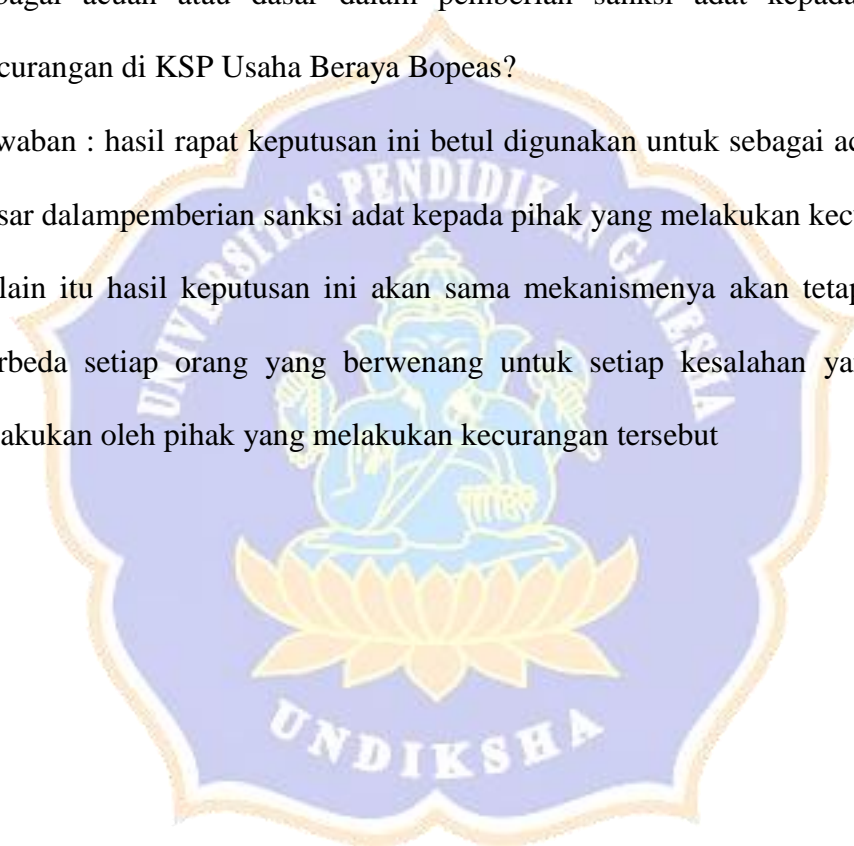
30. Bagaimana keberlanjutan dari penguatan sistem pengendalian internal dengan berlakunya sanksi adat dadia dalam upaya meminimalisir kecurangan di KSP Usaha Beraya Bopeas?

Jawaban: Sampai sejauh ini sanksi adat dadia masih diperlukannya beberapa kajian-kajian ulang ataupun evaluasi ulang terkait adanya beberapa kendala dan masalah yang terjadi. Tindakan lanjut dari hasil evaluasi ini akan

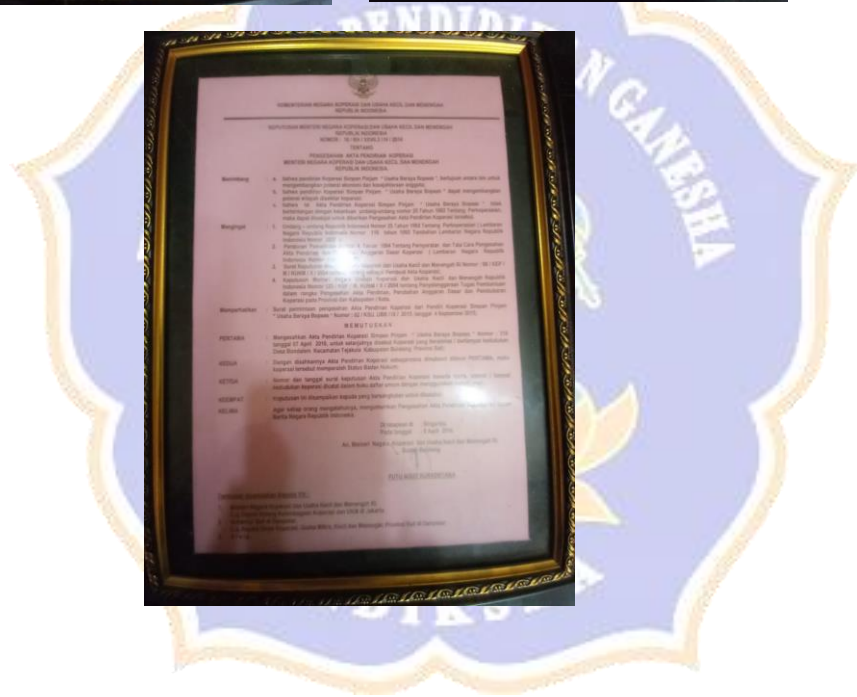
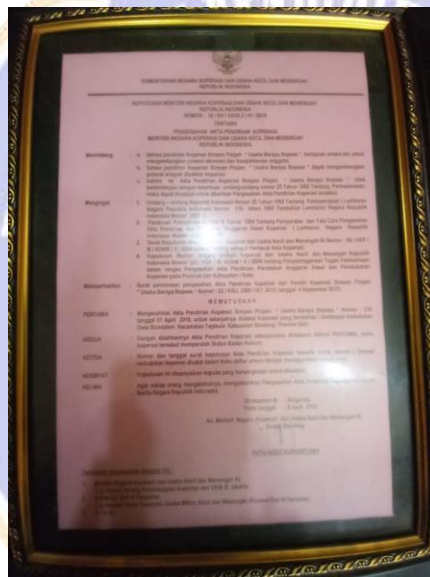
diterapkan kembali pada KSP Usaha Beraya Bopeas dan ternyata semua aturan-aturan yang berlaku didalamnya sangat efektif dalam meminimalisir terjadinya kecurangan pada KSP Usaha Beraya Bopeas dan untuk kedepannya sanksi adat dadia ini akan terus diterapkan pada KSP Usaha Beraya Bopeas

30. Apakah hasil keputusan pada rapat pemberian sanksi adat dapat digunakan sebagai acuan atau dasar dalam pemberian sanksi adat kepada pelaku kecurangan di KSP Usaha Beraya Bopeas?

Jawaban : hasil rapat keputusan ini betul digunakan untuk sebagai acuan dan dasar dalam pemberian sanksi adat kepada pihak yang melakukan kecurangan. Selain itu hasil keputusan ini akan sama mekanismenya akan tetapi hanya berbeda setiap orang yang berwenang untuk setiap kesalahan yang telah dilakukan oleh pihak yang melakukan kecurangan tersebut



Lampiran 5. Sertifikat ijin



Lampiran 6. Dokumentasi rapat penerapan sanksi adat dadia berserta daftar presensi kehadiran

No	Nama	Usia	Tgl
166	KOMANG MUDASTRA	166	
167	KOMANG TRIGU YULHA PRADIPTA	167	
168	KADEK SUARDIKASUCI	168	
169	KEJI BUKA	169	
170	MADE ARTINI	170	
171	PUTI ARIDAYANI	171	
172	KADEK DEWI PRIYANTINI	172	
173	KOMANG ADI PRABAWA SUTEJA	173	
174	KOMANG ARYASA	174	
175	GEDE WIDHADAPUTI RUMI	175	
176	KOMANG TRI ADNYANA	176	
177	KEPUT SALAWARA	177	
178	KADEK SUARDIKA GRIYA	178	

No	Nama	Usia	Tgl
167	KEPUTI YULHA	167	
168	KEPUTI YULHA	168	
169	KEPUTI YULHA	169	
170	KEPUTI YULHA	170	
171	KEPUTI YULHA	171	
172	KEPUTI YULHA	172	
173	KEPUTI YULHA	173	
174	KEPUTI YULHA	174	
175	KEPUTI YULHA	175	
176	KEPUTI YULHA	176	
177	KEPUTI YULHA	177	
178	KEPUTI YULHA	178	
179	KEPUTI YULHA	179	
180	KEPUTI YULHA	180	
181	KEPUTI YULHA	181	
182	KEPUTI YULHA	182	
183	KEPUTI YULHA	183	
184	KEPUTI YULHA	184	
185	KEPUTI YULHA	185	
186	KEPUTI YULHA	186	
187	KEPUTI YULHA	187	
188	KEPUTI YULHA	188	
189	KEPUTI YULHA	189	
190	KEPUTI YULHA	190	
191	KEPUTI YULHA	191	
192	KEPUTI YULHA	192	
193	KEPUTI YULHA	193	
194	KEPUTI YULHA	194	
195	KEPUTI YULHA	195	
196	KEPUTI YULHA	196	
197	KEPUTI YULHA	197	
198	KEPUTI YULHA	198	
199	KEPUTI YULHA	199	
200	KEPUTI YULHA	200	

No	Nama	Usia	Tgl
167	KEPUTI YULHA	167	
168	KEPUTI YULHA	168	
169	KEPUTI YULHA	169	
170	KEPUTI YULHA	170	
171	KEPUTI YULHA	171	
172	KEPUTI YULHA	172	
173	KEPUTI YULHA	173	
174	KEPUTI YULHA	174	
175	KEPUTI YULHA	175	
176	KEPUTI YULHA	176	
177	KEPUTI YULHA	177	
178	KEPUTI YULHA	178	
179	KEPUTI YULHA	179	
180	KEPUTI YULHA	180	
181	KEPUTI YULHA	181	
182	KEPUTI YULHA	182	
183	KEPUTI YULHA	183	
184	KEPUTI YULHA	184	
185	KEPUTI YULHA	185	
186	KEPUTI YULHA	186	
187	KEPUTI YULHA	187	
188	KEPUTI YULHA	188	
189	KEPUTI YULHA	189	
190	KEPUTI YULHA	190	
191	KEPUTI YULHA	191	
192	KEPUTI YULHA	192	
193	KEPUTI YULHA	193	
194	KEPUTI YULHA	194	
195	KEPUTI YULHA	195	
196	KEPUTI YULHA	196	
197	KEPUTI YULHA	197	
198	KEPUTI YULHA	198	
199	KEPUTI YULHA	199	
200	KEPUTI YULHA	200	

No	Nama	Usia	Tgl
167	KEPUTI YULHA	167	
168	KEPUTI YULHA	168	
169	KEPUTI YULHA	169	
170	KEPUTI YULHA	170	
171	KEPUTI YULHA	171	
172	KEPUTI YULHA	172	
173	KEPUTI YULHA	173	
174	KEPUTI YULHA	174	
175	KEPUTI YULHA	175	
176	KEPUTI YULHA	176	
177	KEPUTI YULHA	177	
178	KEPUTI YULHA	178	
179	KEPUTI YULHA	179	
180	KEPUTI YULHA	180	
181	KEPUTI YULHA	181	
182	KEPUTI YULHA	182	
183	KEPUTI YULHA	183	
184	KEPUTI YULHA	184	
185	KEPUTI YULHA	185	
186	KEPUTI YULHA	186	
187	KEPUTI YULHA	187	
188	KEPUTI YULHA	188	
189	KEPUTI YULHA	189	
190	KEPUTI YULHA	190	
191	KEPUTI YULHA	191	
192	KEPUTI YULHA	192	
193	KEPUTI YULHA	193	
194	KEPUTI YULHA	194	
195	KEPUTI YULHA	195	
196	KEPUTI YULHA	196	
197	KEPUTI YULHA	197	
198	KEPUTI YULHA	198	
199	KEPUTI YULHA	199	
200	KEPUTI YULHA	200	



Lampiran 7. Surat keputusan penetapan sanksi adat dadia

**KSP USAHA BERAYA BOPEAS**  
**BADAN HUKUM 16/06/2016/IV/2016**  
 Sekretariat: Jl. Rajapalela, Purbasari 316, Kec. Tapakula, Kab. Purbalingga, Kab. Sukoharjo  
 Telp. 081337722346 (0562) 5302499

---

**KEPUTUSAN PENETAPAN SANKSI ADAT DADIA**  
**KSP "USAHA BERAYA BOPEAS"**  
 Nomor : 006/KSP/UBB/2019

TENTANG  
**TATA CARA PENERAPAN SANKSI ADAT DADIA**

MENIMBANG :

- a. bahwa untuk meminimalisir adanya permasalahan di dalam fungsi dan struktur organisasi maka perlu adanya penerapan sanksi adat dadia
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan poin a perlu ditetapkan Keputusan Penetapan tentang Tata Cara Penerapan Sanksi Adat Dadia.

MENGINGAT :

1. Undang - Undang Republik Indonesia No. 11 tahun 2019 tentang Cipta Kerja.
2. Undang - Undang 1945 dalam pasal 18 B ayat 2 tentang Mewakili dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat
3. UU No. 1 tahun 1946 yu UU 73 tahun 1958 tentang tata suatu peraturan yang dapat dibukuk keasli atas kelengkapan aturan yang telah ada sebelum perubahan dilakukan
4. Undang - Undang No 1 Tahun 1951 tentang sanksi adat yang ada dan sepanjang diakui oleh masyarakat adat yang bersangkutan masih diakui keberadaannya dalam hukum nasional

5. Undang - Undang No 17/04/1991 tentang ketentuan pemerintahan, ketika adanya peraturan selanjutnya hukum
6. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 17/PM/M.KUM/01/2015, Tentang Pengawasan Koperasi.
7. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 19/PM/M.KUM/01/2015, Tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi.
8. Peraturan Kelehan Adat Dadia tentang keputusannya sanksi adat KSP "USAHA BERAYA BOPEAS"

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN: **KEPUTUSAN PENETAPAN SANKSI ADAT DADIA**  
**KSP USAHA BERAYA BOPEAS**

BAB I  
 Ketentuan Umum  
 Pasal 1  
 Yang dimaksud dengan:

1. Sanksi adat dadia adalah aturan tambahan selain SOP (Standar Operasional Prosedur) yang berlaku regas dalam meminimalisir terjadinya kecurangan pada KSP Usaha Beraya Bopias yang dilakukan oleh seluruh kepegawaian pada KSP Usaha Beraya Bopias.

BAB II  
 Penerapan sanksi adat dadia  
 Pasal 2  
 Tata cara penerapan sanksi adat dadia

KSP Usaha Beraya Bopias menerapkan sanksi adat dadia melalui beberapa tahapan :

1. Menentukan permasalahan yang terjadi pada koperasi
2. Melakukan analisa mengenai penyebab munculnya permasalahan tersebut yang berdampak pada koperasi
3. Melakukan pencarian solusi atau cara mengatasi permasalahan dengan melakukan musyawarah pada rapat anggota bersama kelehan dadia serta seluruh dadia untuk memutuskan perbaikan yang perlu dilakukan dikarenakan SOP (Standar Operasional Prosedur) masih belum mampu meminimalisir kecurangan pada tata kelola keuangan KSP Usaha Beraya Bopias.
4. Membuat kesepakatan mengenai rumusan solusi yaitu dengan diterapkan sanksi adat dadia dan merumuskan sanksi-sanksi yang akan diterapkan.
5. Mulai menerapkan sanksi adat dadia guna untuk meminimalisir munculnya permasalahan yang terjadi pada KSP Usaha Beraya Bopias

BAB III  
 Pemberian wewenang  
 Pasal 3  
 Wewenang pemberian sanksi adat dadia

1. Wewenang pemberian sanksi ringan dilakukan oleh manager KSP Usaha Beraya Bopias dengan sanksi yang berupa :
  - a. Pemberian teguran lisan atas tindakan yang dilakukan
  - b. Pemberian teguran tertulis atas tindakan yang dilakukan
  - c. Membuat surat pernyataan tertulis mengenai tidak melakukan tindakan yang sama kembali.
2. Wewenang pemberian sanksi sedang dilakukan oleh kelehan adat dadia dan ketua KSP Usaha Beraya Bopias dengan sanksi yang berupa:
  - a. Penurunan gaji atau penurunan gaji yang disesuaikan dengan keputusan adat
  - b. Pemberhentian sementara dari jabatan selama kurun waktu yang ditentukan berdasarkan keputusan adat
3. Wewenang pemberian keputusan sanksi berat dilakukan oleh kelehan adat dadia yang dilakukan pada rapat anggota bersama seluruh karna adat dadia, dengan sanksi yang berupa:
  - a. Dikenakan denda berupa pengembalian uang sesuai dengan keputusan adat dengan tengat batas waktu penahayaran yang ditentukan melalui rapat anggota
  - b. Pemberhentian secara tidak hormat yang diputuskan berdasarkan hasil rapat anggota

- c. Dikenakan sanksi adat kasepekap berdasarkan dari hasil rapat anggota. Berikut/berupa tahapan dalam menentukan keputusan sanksi adat kasepekap:
  - Perlu dilakukan rapat bersama yang nantinya rapat ini dikeahi oleh kelehan dadia
  - Hasil dari keputusan rapat ditunjukkan kepada karna dadia untuk menjadi pertimbangan akan keputusan tersebut.
  - Kelehan dadia wajib untuk mempertimbangkan berbagai masukan dari karna dadia akan keputusan yang nanti akan diambil.
  - Keputusan akhir akan disampaikan oleh kelehan dadia dihadapan seluruh karna dadia pada saat rapat berlangsung.

**KSP USAHA BERAYA BOPEAS**  
**BADAN HUKUM 16/06/2016/IV/2016**  
 Sekretariat: Jl. Kone 116, Kec. Tapakula, Kab. Purbalingga, Kab. Sukoharjo

---

**RAPAT KEPUTUSAN PEMBERIAN SANKSI KASEPEKAP**  
 Nomor : 09/BA-BA-15/08/2020

Pada hari ini Sabtu, 04 April 2020, telah dilaksanakan keputusan pemberian sanksi berempat di Pura Madala, Desa Swadahan, Kecamatan Tapakula, Kabupaten Purbalingga, dengan dadia hadir anggota kelenteng

Adapun susunan acara keputusan pemberian sanksi adat adalah sebagai berikut :

1. Pembukaan
2. Pernyataan permasalahan
3. Pembacaan Sanksi Adat
4. Sidang Pembahasan dan Pengambilan Keputusan
  - a. Mempertimbangkan permasalahan dengan sanksi adat kelenteng
  - b. Memasukkan sanksi kasepekap yang diberikan kepada pihak yang bersangkutan oleh Kelehan Adat
  - c. Penandatangan dan pengesahan hasil keputusan
5. Penutup

Rapat dilaksanakan mulai pukul 10:00 wita dipimpin oleh Kelehan Adat sebagai Penutup Sidang, setelah penyampaian berita dengan susunan acara diatas serta menyimpulkan keputusan bersama karna dadia, maka rapat keputusan pemberian sanksi adat ini memutuskan :

1. Menyetujui dan menyetujui permasalahan yang dilakukan tersebut termasuk dalam sanksi berat pada koperasi kelenteng.
2. Menyetujui dan menyetujui perbaikan yang telah dilakukan merupakan hal yang dianggap berhasil sesuai dengan keluhan yang telah disampaikan pada rapat.
3. Menyetujui dan menyetujui bahwa berdasarkan dari hasil rapat pihak yang bersangkutan diwajibkan tetap menstabilkan yang sesuai keputusan adat dan beresnya menstabilkan sanksi yang di dapatkan sesuai dengan pertimbangan- pertimbangan yang telah dilakukan pada rapat.
4. Menyetujui dan menyetujui bahwa hasil dari keputusan pemberian sanksi adat ini berhasil untuk dan telah dapat dipergesai pegas.

Lampiran 8. Rapat pemberian keputusan sanksi adat dan Hasil rapat pemberian sanksi adat



Lampiran 9. Dokumentasi penelitian



## RIWAYAT HIDUP



Putu Fany Nadila Permata Sari atau biasa dipanggil Fany lahir di Kota Singaraja, 17 Januari 1999. Penulis merupakan anak pertama dari pasangan suami istri, Bapak Putu Nngurah Evantri Pinatih, S.E dan Ibu Luh Jempiring, S.E. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Hindu. Kini penulis beralamat di Jalan Srikandi Sambangan Gang Durian blok c No.43 Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Penulis menyelesaikan Pendidikan di Taman Kanak-Kanak pada tahun 2005, Kemudian melanjutkan Pendidikan di SD Negeri 3 Banjar Jawa lulus pada tahun 2011, Kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 6 Singaraja dan bersekolah di SMA Negeri 2 Singaraja mengambil Jurusan Matematika & Ilmu Pengetahuan Alam dan lulus pada tahun 2017, kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke Prodi S1 Akuntansi di Fakultas Ekonomi, Universitas Pendidikan Ganesha. Pada Semester Akhir tahun 2021 Penulis menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Penerapan Penguatan Sistem Pengendalian Internal Dengan Berlakunya Sanksi Adat Dadia Dalam Upaya Meminimalisir Kecurangan Pada Koperasi (Studi Kasus “Koperasi Simpan Pinjam Usaha Beraya Bopeas”)”. Selanjutnya pada Tahun 2017 sampai dengan penulisan Skripsi ini, Penulis masih terdaftar sebagai mahasiswa Prodi S1 Akuntansi di Universitas Pendidikan Ganesha.